

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2016, merupakan suatu bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, yang pelaksanaan program kegiatannya dilaksanakan selama 12 bulan, sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini suatu realisasi pelaksanaan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur dalam rangka penyelenggaraan **“good governance”**. Pada dasarnya, bahwa kinerja Dinas merupakan suatu action plan dalam rangka merealisasikan visi Dinas yang telah ditetapkan, yaitu: **“Terwujudnya Sistem Pergerakan yang Handal dan Efisien”**.

Dalam menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Barat, telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor Perhubungan berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis yang dalam hal ini telah dirumuskan berbentuk Rencana Strategis (Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018) dengan Tujuan Pembangunan Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang mendukung kinerja dalam jangka 5 (lima) tahun (2013 – 2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi ;
2. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
3. Meningkatkan Penyediaan Prasarana Transportasi Di Jawa Barat ;
4. Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Jalan.

Dari tujuan tersebut pada tahun 2016 dapat ditetapkan Sasaran Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai penjabaran tujuan secara kuantitatif yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Moda Transportasi Umum dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 - a. Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan target 55,56 %, dan ;
 - b. Prosentase Kepemilikan Armada Angkutan Umum (AKDP) Perseorangan menjadi Badan Hukum dengan target 50,11 % ;
 - c. Prosentase Ketersedian AKDP di Jawa Barat dengan target 94,00 %.
2. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Umum dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 - a. Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di jembatan timbang dengan target 79,00 % dan ;
 - b. Prosentase kendaraan umum laik jalan di Jawa Barat dengan target 100 %
3. Meningkatnya Ketersedian Prasarana Transportasi dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
 - a. Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP dengan target 66,67 % ;

- b. Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat dengan target 74,29 % ;
 - c. Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru) dengan target 23,39 %.
4. Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
- a. Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi dengan target 21,00 %.

Sampai dengan akhir tahun 2016, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengelola program/ kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah kegiatan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124,543,479,095.00 terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 83,465,566,849.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60,869,788,590.00,- atau 72.93 % dan alokasi anggaran belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 41,077,912,246.00,- dengan realisasinya sebesar Rp. 39,084,700,275.00,- atau 95,15 %.

Keberhasilan pembangunan bidang Perhubungan di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat dari berbagai capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Peningkatan Keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN

Keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN juga makin meningkat, dari 12 Kabupaten/Kota pada Tahun 2015 dapat ditingkatkan menjadi 15 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 yang kemudian mendapatkan penghargaan dari Pemerintah pusat, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang transportasi publik di Jawa Barat semakin baik;

b. Peningkatan Kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum

Kepemilikan angkutan umum AKDP yang berbadan hukum juga mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya cukup besar hal itu dapat mendorong tercapai program penataan angkutan umum di Jawa Barat serta mendorong tumbuhnya industri angkutan umum;

c. Peningkatan Ketersediaan AKDP di Jawa Barat

Ketersediaan angkutan AKDP di Jawa Barat sudah relatif besar yaitu sampai dengan tahun 2015 sebesar 88,11 % dan pada tahun 2016 dicapai 94 %, sehingga diharapkan aksesibilitas AKDP di jalan Provinsi juga semakin meningkat, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan jasa transportasi khususnya AKDP semakin terlayani dengan baik;

d. Peningkatan Ketersediaan Dermaga / Pelabuhan ASDP

Pembangunan dalam rangka peningkatan penyediaan dermaga/pelabuhan ASDP di Jawa Barat juga mengalami peningkatan, hal ini tentu dapat meningkatkan pelayanan transportasi ASDP khususnya di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau oleh angkutan perairan di Danau atau di Sungai;

e. Peningkatan Penyelesaian Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati dan Pengembangan Bandara Nusawiru

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati dan Pengembangan Bandara Nusawiru, dalam tahun 2016 secara perlahan juga telah mengalami peningkatan. Peningkatan yang relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan biaya untuk mewujudkan pembangunan BIJB dan pengembangan Bandara Nusawiru, namun sekecil apapun peningkatannya diharapkan dapat mendorong terwujudnya Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati dan Pengembangan Bandara Nusawiru.